



IRGSC Policy Brief

No 003, March 2013

Research and analysis from the Institute of
Resource Governance and Social Change (IRGSC)
www.irgsc.org

Penanganan Bencana Sensitif Pendidikan: Upaya Sistematis Memperkuat Kapasitas Anak Menghadapi Bencana

Jonatan A. Lassa dan Yosef Boli

(Institute of Resource Governance and Social Change)

1. Pendahuluan

Regulasi terkait perlindungan anak tidak membedakan situasi normal dan darurat (bencana). Karena itu, sikap permisif terkait korban anak-anak yang menderita maupun meninggal karena situasi bencana tidak dibenarkan. Sikap membenarkan kematian anak-anak dan orang-dewasa sebagai '*force majeure*' (Latin: *casus fortuitus* atau peristiwa yang tak terhindarkan) tidak bisa diterima dalam perspektif perlindungan hak anak.

Karena itu, upaya sistematis memperkuat kapasitas anak dalam menghadapi bencana haruslah bersifat *imperative*. Masalahnya, demi menghindari bencana pendidikan, terdapat *gap* dalam pemikiran para aktor yang bekerja di sektor pendidikan bencana - yakni bahwa di satu sisi mereka sadar soal pendidikan sebagai hak asasi manusia sedangkan penanganan bencana tidak dilihat sebagai penerapan hak asasi manusia termasuk anak-anak.

Dalam tata-kelolah bencana global (dan nasional) dikenal sistem *cluster* seperti pangan dan nutrisi, shelter, air-sanitasi dan pendidikan. Pusat dari upaya intervensi dari *cluster* pendidikan adalah anak-anak. Di Indonesia, inisiatif upaya intervensi *cluster* pendidikan berada ditangan lembaga internasional/PBB (UNICEF dan Save the Children - Stoddard *et al* 2007). Pemerintah untuk sementara di posisikan sebagai pihak *demand* yang memerlukan support penguatan kapasitas diberbagai aras. Instrumen yang populer dipakai saat ini adalah "Standard Minimum Untuk Pendidikan: Kesiapsiagaan, Respon dan Pemulihan" yang diproduksi oleh INNE (*Inter-agency Network for Education in Emergencies*).

Cita-cita intervensi *cluster* pendidikan dengan ordo yang lebih tinggi adalah proteksi anak-anak dengan menciptakan zona aman ketika mereka berada di dalam maupun sekitar gedung dan fasilitas sekolah. Karena itu, sekolah yang aman dan fasilitas sekolah yang terproteksi menjadi syarat utama proteksi perlindungan anak. Respon cepat kedaruratan harusnya menjadi pilihan sekunder. Table 1 di bawah menunjukkan bahwa cita-cita perlindungan anak dari bencana masih menjadi pekerjaan rumah para pengambil kebijakan. Sebagian sekolah di Republik ini mungkin saja bisa berfungsi ganda: hari ini menjadi sekolah, tetapi besok hari, gedung sekolah yang rentan mungkin akan menjadi kuburan bagi

anak. Karena itu, dalam perspektif yang relatif vulgar, dalam konteks di negeri yang korup, beda sekolah dan kuburan menjadi tipis.

Anak-anak (termasuk orang tua) adalah kelompok rentan namun bukan sekedar kelompok rentan yang pasif karena mereka adalah kelompok rentan yang memiliki ketahanan tersendiri yang perlu dipahami. Pertanyaannya adalah bagaimana anak dapat mereduksi risiko bencana? Bagaimana anak-anak perempuan dan laki-laki terlibat dalam perencanaan kebencanaan (disaster planning)? Apa saja *enabling and disabling conditions* dari pendekatan pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim yang berfokus pada anak? Bagaimana melakukan "Penanganan Bencana Sensitif Pendidikan"? Bagaimana melakukan "Upaya Sistematis Memperkuat Kapasitas Anak Menghadapi Bencana"? Bagaimana mungkin melakukan upaya perkuatan kapasitas anak menghadapi bencana bila para pengambil kebijakan kurang mampu memahami subyek anak-anak?

Table 1: Beberapa Contoh Kerusakan Gedung Sekolah Dari Bencana di Indonesia

Beberapa Peristiwa Bencana	Unit Kerusakan Sekolah		
	Runtuh (Destroyed)*	Rusak berat dan ringan	Total kerusakan sekolah
Gempa Padang 2009	2,512*	n/a	2,512
Aceh/Nias (Tsunami 2004)	743	1323	2,066
Gempa Jogjakarta (2006)	1621	56	1677
Banjir Aceh 2006	19	189	208
Total	4,895	1,568	6,463

*Antara rusak berat atau total runtuh (Sumber– Joint Report by the BNPB, Bappenas and the Provincial and District/City Governments of West Sumatra and Jambi and international partners, October 2009. *West Sumatra and Jambi Natural Disasters: Damage, Loss and Preliminary Needs Assessment.*)

Tulisan singkat ini berpendapat bahwa tanpa memahami beberapa paradigma dasar terkait bagaimana membangun upaya penanganan bencana serta pengurangan risiko yang berpusat pada anak, maka tidak mungkin mencapai hasil yang memadai sebagaimana diharapkan.

2. Kerangka teoritis perkembangan anak

Mendekati masalah perkembangan anak terkait bencana dan adaptasi iklim, terdapat berbagai paradigma disain PRB/PI program: bagaimana program itu merepresentasikan bagaimana anak belajar, berpikir, bertindak, menuntut kebutuhan dan hak, dan mempromosikan partisipasi mereka?

Ada dua model teoritis terkait perkembangan anak yang 'mewakili' debat soal perkembangan anak. Pertama: teori tahapan (*stage theory*) dan teori sosial-budaya (*socio-cultural theory*).

2.1. Stage theory: pendekatan universal

Secara historis, tujuan utama studi perkembangan anak mendapati hukum umum tentang perkembangan anak (Haynes et. al. 2010; Woodhead 1999). Perspektif *universalist* ini dapat ditarik kembali kepada asumsi filsafat era pencerahan bahwa manusia dianggap sebagai bagian dari alam dan karenanya ia tunduk pada hukum umum ilmu pengetahuan dalam semangat paradigma positivistik (Jahoda 1992). Teori perkembangan (*stage theory*) melihat umur anak dan fase perkembangan sebagai

variabel utama dalam memprediksi soal kepatutan kapasitas pengetahuan dan skill mengolah pengetahuan (Boyden 2003).

Jean Piaget (1954; 1969) menganggap perkembangan anak diatur oleh hukum psikologis universal dan struktur biologis yang ditandai oleh tahapan-tahapan yang sudah pasti yang dimulai dengan kelahiran (*sensory-motor action*) dan berkulminasi pada usia remaja dengan perkembangan logis yang otomatis. Jadi upaya mengajarkan anak pengetahuan atau skill yang lebih tinggi dari 'umurnya' tidak mungkin berhasil. Jadi ada semacam deterministik natural yang dipercaya secara lebih ketat.

Cara pandang Piaget di atas dikenal dengan paradigma *Piagetian* di mana penelitian menggunakan teori ini berkontribusi pada proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Sayangnya, konsep ini dicurigai dilakukan pada konteks kelas menengah di Europe dan USA/Canada dan karenanya mengabaikan konteks budaya (Woodhead 1998) dan menariknya banyak penelitian ini digeneralisir ke konteks negara berkembang seperti Indonesia. Ketimbang mengatakan 'anak-anak melakukan x dan y di konteks z, umumnya kaum *Piagetian*, cenderung mengatakan 'anak melakukan x dan y' nir-konteks atau tanpa mengetahui konteks di mana fenomena tersebut terjadi (Rogoff 2001).

2.2. Pendekatan Sosio-Budaya Dalam Perkembangan Anak

Pandangan *socio-cultural* melihat perkembangan manusia sebagai proses budaya di mana manusia berkembang sebagai partisipan dalam praktek dan situasi komunitasnya (Rogoff 1990). Konteks budaya selalu intrinsik terhadap proses perkembangan pengetahuan (Cole 1996). Karena proses berpengetahuan menyatu dan berkembang dalam aksi, kerja, permainan, pengembangan literatur, teknologi, seni, dan perbincangan dari anggota masyarakat. Misalnya melalui interaksi dengan kaum yang lebih dewasa, seorang anak mampu mendapatkan, menginternalisasikan serta mengembangkan pengetahuan tertentu (Rogoff 2003).

Dasar dari teori sosial budaya ini berakar pada penelitian psikolog Russia Lev Vygotsky (1978). Vygotsky menempatkan bahasa dan komunikasi sebagai inti dari perkembangan intelektual dan individu. Pandangan psikologi Vygotsky's dipengaruhi oleh ketertarikannya pada seni, sejarah, literatur, budaya dan sosiologi karenanya pandangannya lebih sensitif pada perbedaan perkembangan anak yang berbeda ditiap konteks karena tiap orang berpikir sesuai dengan dunia mereka. Kontribusi utama Vygotsky dikenal dengan '*zone of proximal development*' - yakni dimaksudkan bahwa dinamika wilayah di mana anak dan partnernya yang lebih memiliki ketrampilan terlibat dalam aktivitas bersama yang berujung pada 'tindakan bersama' yang sesungguhnya melampaui tahapan umurnya secara 'alamiah' (berdasarkan asumsi Piagetian). Dalam kondisi ini, Vygotsky mendapati bahwa anak dapat memahami pengetahuan ataupun ketrampilan yang mana tidak mungkin mereka pikirkan/lakukan secara sendiri.

Bukti empirik argumentasi Vygotsky datang dari Kwara'ae Oceania (Pasifik) di mana anak usia tiga tahun usia tidak hanya mengurus adik-adiknya (sesuatu yang familiar dengan konteks Indonesia), tetapi mengambil hasil pertanian sendiri untuk dijual di pasar, sehingga berkontribusi signifikan bagi pendapatan keluarga. Suku Aka di Afrika mengajarkan delapan sampai sepuluh bulan mereka bayi berusia bagaimana melempar tombak kecil dan menggunakan tongkat kecil menuju sumbu miniatur dengan pisau tajam. Masyarakat Efe di Kongo, bayi secara rutin diajarkan untuk menggunakan parang

dengan aman dan bayi dalam masyarakat Fore di Papua Nugini mampu menangani keduanya pisau dan api dengan aman pada saat mereka bisa berjalan.

Section 3 dan 4 Paper ini memberikan bukti empirik pengalaman sosial-budaya dari Indonesia dengan konteks Sikka (NTT) dan Rembang (Jawa Tengah).

3. Anak dan Konteks Sosial Budaya

3.1. Definisi anak: kategori umur

Umur adalah faktor penting tentang bagaimana anggota komunitas hidup dengan dan mampu mengelolah risiko. Secara empirik, anak adalah mereka yang berumur 18 tahun (*United Nations Convention on Rights of the Child*). Sedangkan banyak penulis membedakan antara anak umur 'bayi dan balita' (0–5 years), 'anak-anak' (6–11 years) and 'remaja' (12–18 years).

Yang pasti, lamanya waktu seseorang hidup dapat secara berarti mempengaruhi kemampuan orang tersebut dalam siap-siaga, meresponi dan mampu memulihkan diri dari bencana (Peek 2009). Dalam paradigma ini, maka remaja dianggap lebih berkapasitas dari balita sedangkan semakin berumur (orang tua) kemampuan fisik juga kemudian memudar. .

3.2. Konteks Legal

Dalam konteks legal dan pilkada/pemilu, seseorang yang berumur 18 tahun sudah dianggap bukan sebagai anak-anak (lihat konteks Inggris - Children Act 41/1989). Dalam berbagai budaya, umur antara 16-18 dianggap sebagai fase peralihan dari anak menjadi dewasa.

Menurut UU No. 3/1997 dan UU Perlindungan Anak No. 23/2003 anak-anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun termasuk ditingkat *embryo*. Definisi perlindungan anak adalah sebagai segala upaya untuk memastikan dan melindungi atas hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. UU 23/2003 adalah bentuk adopsi *United Nations Declaration of the Rights of the Child (DRC)* dan *United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)*.ⁱⁱ DRC merupakan hasil pembalikan paradigma dari anak sebagai sekedar 'obyek' atau 'dewasa kecil' menjadi subyek yang bukan hanya sama dengan orang dewasa tetapi membutuhkan proteksi khusus karena kerentanan mereka. Sedangkan CRC melanjutkan konsep DRC dengan melihat anak yang memiliki keberhakan atas (*entitled to*) hak-hak dasar yang harus dilindungi baik dalam konteks 'normal' maupun konteks bencana.

3.3. Gender

Anak-anak adalah laki-laki (boys) dan anak perempuan (girls). Tanpa memahami dimensi gender, intervensi para pihak sangat mungkin terjebak pada ketimpangan yang sudah ada. Dalam studi yang lebih spesifik, ditemukan bahwa tanpa memahami dunia anak laki-laki (boyhood) dan anak perempuan (girlhood) maka tidak mungkin upaya sistimatis yang dibangun mampu efektif mengurangi kerentanan spesifik anak-anak perempuan dan laki-laki. Penelitian Haynes et. al. (2010) di Sikka dan Rembang menunjukkan bahwa ada gap persepsi sistimatis tentang anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan di mana anak-anak perempuan, laki-laku, ibu-ibu, bapak-bapak hingga para pejabat melihat secara timpang dan diskrimintatif terkait kapasitas anak-anak perempuan dan laki-laku.

4. Beberapa fakta tentang peran anak dalam penanganan bencana

Anak-anak sebagai kekuatan penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Menggunakan hasil empirik dari Indonesia, bagian ini menuturkan secara singkat dan selektif terkait peran anak-anak sebagai aktor pengurangan risiko, aktor komunikasi risiko, aktor yang juga secara aktif memiliki prioritas risiko dan prioritas penanganan risiko tersendiri. (Data empirik lebih detail bisa dilihat di Haynes et. al. 2010).

4.1. Anak sebagai produsen risiko dan aktor pengurangan risiko

Dalam tradisi anak-anak negara berkembang termasuk anak-anak Indonesia terutama di NTT (pengalaman dari Sikka), anak-anak memiliki 'kuasa' untuk memilih pohon mana yang harus ditumbangkan dan pohon mana yang kayunya akan di ambil. Anak adalah *labor force* bagi penghidupan keluarga. Di Mesabawa (Sikka), anak-anak berumur 15-18 mengatakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam mengurangi pembalakan hutan karena mereka paham soal peran seorang pengambil kayu dan kecenderungan memotong pohon untuk kayu bakar secara selektif. Seorang anak dari Mesabawa mengatakan bahwa "Kami dapat memilih pohon yang dapat kami potong dan memilih untuk tidak membakar hutan ketika berada di hutan" (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. Desa Mesabewa: apa yang dapat dilakukan oleh anak perempuan dan anak lelaki untuk mengurangi risiko bencana?

Apa yang dapat dilakukan anak laki-laki untuk mengurangi dampak bencana?		Apa yang dapat dilakukan anak perempuan untuk mengurangi dampak bencana?	
Menurut Anak Perempuan	Menurut Anak Laki-laki	Menurut Anak Perempuan	Menurut Anak Laki-Laki
<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan sampah di sungai • Menanam kembali pohon yang sudah ditebang • Menolong korban bencana dengan donasi makanan dan pakaian • Partisipasi dalam menyelesaikan masalah di kampung • Melaporkan kejadian tertentu kepada orang tua dan pengurus desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kepada pengurus desa tentang risiko tertentu • Menolong dalam kesiapsiagaan • Memperbaiki hal yang rusak di kampung • Menanam pohon untuk mencegah banjir dan longsor • Membuang sampah pada tempatnya • konservasi air dan lahan (alam) • Menjauh dari genangan air banjir • Tidak memakan makanan basah atau meminum air yang tidak dimasak • Sumbangan ke korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Menanam pohon di tepi jalan dan tepi sungai untuk mencegah banjir • Kerja sama sesama anggota komunitas • Menolong korban • Memberitahu pemilik ternak atau pemilik lahan yang mengalami kerugian karena banjir atau longsor • Tidak memotong pohon 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pemadaman rumah yang terbakar • Menolong orang yang rentan terhadap gempa • Tidak memotong pohon • Menjaga kebersihan halaman • Membersihkan sauran air • Melaporkan kepada pihak terkait tentang korban tertentu • Membantu korban bencana

Sumber: Haynes et. al. 2010

Table 2 di atas juga menunjukkan bagaimana perspektif anak-anak dalam melihat peran mereka sebagai aktor dalam pengurangan risiko maupun *first responder* (lihat 4.4). (Lihat detail pada laporan Haynes et. al. 2010).

4.3. Anak sebagai risk communicator

Di Pakis dan Dowan (Rembang), anak-anak mampu mengkomunikasikan kepada para orang tua terkait risiko pertambangan dan longsoran yang berujung pada penghentian praktik-praktik tambang tradisional. Beberapa orang tua terutama ibu-ibu yang diwawancarai di desa di atas bercerita tentang bagaimana mereka tidak mampu tidur nyenyak karena cerita-cerita anak-anak terkait kemungkinan-kemungkinan bencana seperti gempa maupun bencana lainnya yang jarang dipikirkan. Hal ini konsisten terlihat di Sikka (NTT).

4.4. Anak sebagai *first responders* keluarga

Dari cerita di Sikka maupun di Keerom (Papua) juga ditemukan tuturan bahwa anak-anak menjadi *first responder* bagi penyelamatan aset penghidupan mereka, di mana anak-anak membantu memindahkan sapi dan kambing dari zona bahaya ke zona aman (Keterangan Seorang Bapak di Mesabewa, Sikka ketika ditanyakan apakah yang anak-anak dapat lakukan ketika terjadi bencana).

4.3. Prioritas Risiko Anak

Anak-anak memiliki prioritas risiko tersendiri. Pendapat para pengambil kebijakan dan orang tua tidak selalu lebih obyektif dibandingkan anak-anak. Dalam diskusi terkait prioritas risiko di Desa Pakis (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah - Oktober 2008), ditemukan anak-anak memiliki determinasi tersendiri dalam prioritas risiko. Anak-anak juga mampu memiliki imajinasi risiko yang lebih baik dari orang tua maupun pengambil kebijakan. Uji coba ini pernah juga dilakukan di Garut (Jawa Barat) serta Sikka (NTT) dalam periode Oktober-November 2008.

Di Pakis (Rembang, Jateng) Ibu-ibu misalkan mengatakan bahwa *dengue fever* sebagai risiko tertinggi dan berpendapat bahwa para lelaki dewasa tidak mampu memahami fenomena demam berdarah. Para ibu melihat *dengue* lebih berbahaya dari banjir karena banjir terlokalisir sesuai aliran sungai dengan konteks topografi yang lebih mikro sedangkan *dengue* menyebar dengan luas sebaran yang lebih luas dan lebih cepat menjangkau semua kalangan di desa. Sedangkan menariknya Pemda Rembang melihat konflik politik sebagai risiko yang penting (terutama ketika masa-masa Pilkada/Pemilu).

Sedangkan anak-anak di Pakis melihat kebakaran hutan sebagai masalah karena kekeringan cenderung menimbulkan situasi rentan kebakaran. Sedangkan orang tua (perempuan dan laki-laki) lebih berfokus pada risiko-risiko yang dekat dengan sistim penghidupan terkait penyakit tanaman, terkait bagaimana mengairi lahan pertanian (ditengah ancaman kekeringan), angin ribut yang merusak tanaman dan masalah anak-anak yang mudah terserang demam berdarah. Sedangkan Pemda Kabupaten lebih berfokus pada bencana perkotaan seperti kebakaran rumah dan konflik politik. Tanpa konsensus yang lebih produktif, maka prioritas penanganan bencana di tingkat kabupaten hanya akan menjadi bias perspektif elit yang kadang sekedar dibenarkan para "ahli bayaran".

Tabel 3. Prioritas Risiko di Pakis, Rembang oleh Para Pihak: Anak-anak, orang tua dan pemda

	Anak laki-laki	Anak Perempuan	Laki-laki Dewasa	Perempuan Dewasa	Pemerintah Kabupaten	Konsesus (Berbasis peringkat)
1	Banjir	Longsor	Banjir	Dengue Fever	Banjir	Banjir
2	Longsor	Angin ribut	Kekeringan	Longsor	Angin ribut	Longsor/Kekeringan
3	Kebakaran Hutan	Kekeringan	Dengue fever	Kekeringan	Kekeringan	Angin ribut
4	Angin ribut	Gempa	Plant disease	Plant disease	Kebakaran perumahan	Kebakaran Hutan
5	Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin ribut	Political conflict	Dengue fever

Source: Haynes et al. 2010.

5. Penutup: Menjamin keberlanjutan

Anak-anak potensial menjadi agen yang mampu melakukan perlindungan mandiri dengan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan (*enabling environment*). Enabling environment yang diperlukan tidak hanya soal regulasi diberbagai aras dan tingkat, tetapi soal bagaimana membangun wacana yang lebih dalam, berkelanjutan dan meluas terkait pentingnya proteksi anak-anak dalam situasi 'normal' maupun darurat (bencana). Indonesia secara umum masih mengalami transisi dalam reformasi penanganan bencana. Ketidak jelasan peran birokrasi terkait penanganan bencana di sektor pendidikan menjadi salah satu varibale yang perlu diselesaikan, selain masalah insentif, regulasi, sumber daya manusia, tipisnya wacana, serta status quo paradigma tentang anak dan paradigma penanganan bencana yang reaktif.

Masih terdapat gap antara komitmen pemda kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Salah satu contoh yang diungkapkan dari Sikka (NTT), adalah bahwa ketika pemda berkomitmen untuk mengimplementasi konsep sekolah aman, namun dukungan proyek dengan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembangunan gedung yang lengkap dengan petunjuk teknis bangunan dianggap belum ramah gempa.ⁱⁱⁱ Implementasi ditingkat kabupaten/kota masih terbatas pada daerah-daerah di mana terdapat aktor non-pemerintah yang sensitif dan memiliki insentif dalam pengenalan konsep dan instrument penanganan bencana disektor pendidikan.

Temuan kami 5 tahun lalu masih seperti hari ini yakni bahwa ditingkat kabupaten, masih terjadi informasi yang asimetrik terkait penanganan bencana. Kemajuan dari pengarusutamaan melalui institusionalisasi pengurangan risiko bencana sektor pendidikan membutuhkan waktu yang lebih panjang bila struktur insentif tetap kurang dan sumber daya manusia yang terbatas.

Pelibatan pihak sekolah menjadi salah satu jalan keluar yang tidak mudah karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan jarang memperhitungkan beban para guru dan murid serta kelangkaan insentif yang mana masih terbatas pada pilot project.

Yang paling vital adalah bagaimana secara sistimatis para pengambil kebijakan, pegiat dan birokrat penanganan bencana, bertanya langsung kepada anak-anak terkait persepsi dan prioritas risiko menurut anak serta prioritas penanganan bencana menurut anak-anak. Titik berangkat yang sejati seharusnya dari titik ini.

Referensi

- Boyden, J. (2003) 'Children under fire: challenging assumptions about children's resilience' *Children, Youth and Environments*, 13: 1-21.
- Haynes, K., Lassa, J., Tower, B. 2010. "[Child-centered disaster risk reduction and climate change adaptation: Roles of Gender and Culture in Indonesia.](#)" WP 2, *Children in Changing Climate*, Institute of Development Studies, UK.
- Jahoda, G. (1992) 'Crossroads between culture and mind' London: Harvester Wheatsheaf.
- Piaget, J. (1954) '*The child's construction of reality*' London: Routledge.
- Piaget, J. (1969) '*The child's conception of physical causality*' New Jersey: Littlefield.
- Rogoff, B. (1990) 'Apprenticeship in thinking: cognitive development in social context' New York: Oxford.
- Rogoff, B. (2003) 'The cultural nature of human development' New York: Oxford.
- Stoddard, A.; Harmer, A.; Haver, K.; Salomons, D. and Wheeler, V. 2007, "Cluster Approach Evaluation OCHA Evaluation and Studies Section"
- Vygotsky, L. (1978) 'Mind in society' Cambridge: Harvard.
- Woodhead, M. (1999) 'Reconstructing developmental psychology: some first steps', *Children and Society* 13: 3-19.

ⁱ Paper ini dipresentasikan dalam pelatihan Front Line Responders (FLRT) bertema "Pemenuhan pendidikan anak dalam pembangunan kesiapsiagaan dan penanganan bencana kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan UNICEF, dilaksanakan oleh perkumpulan CIS Timor. Ende, Flores, NTT, 04 Maret 2013. Sebagian besar dari paper ini bersumber dari paper penulis sebelumnya yakni: [Haynes, K., Lassa, J., Tower, B. 2010. "Child-centered disaster risk reduction and climate change adaptation: Roles of Gender and Culture in Indonesia." WP 2, Children in Changing Climate, Institute of Development Studies, UK.](#) dan Lassa, J., Haynes, K., Tower, B. What can children do in disaster risk and climate adaptation planning and practice? (Submitted to ENVPLAN A – Status: Revised, to be re-submitted). Oline: <http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=17381>.

ⁱⁱ The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) memasukan hak sipi dan politik termasuk social, ekonomi dan budaya serta proteksi dari pelecehan dan eksploitasi. UNRC diratifikasi oleh negara termasuk oleh Indonesia ditahun 1990 (PP 36/1990).

ⁱⁱⁱ Keterangan Bapak Sirilus (Dinas PPO Sikka, NTT). Workshop Frontline Responders Training, 4-7 Maret 2013.